

EXECUTIVE SUMMARY
PENELITIAN HIBAH BERSAING



MODEL AKSESIBILITAS PETANI SINGKONG TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN Di KABUPATEN BONDOWOSO

Tahun ke I Dari Rencana 2 Tahun

Ketua: Drs. Abdul Kholiq Ashari, MSi/NIDN 026075605
Anggota: Dr. Anastasia Murdyastuti, MSi/ NIDN 0010055812

UNIVERSITAS JEMBER

Desember 2013

**MODEL AKSESIBILITAS PETANI SINGKONG TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

Peneliti : Drs. Abdul Kholiq Ashari, MSi. Ilmu Adm. Negara, FISIP-UJ
Dr. Anastasia Murdyastuti, MSi. Ilmu Adm. Negara, FISIP-UJ

Mahasiswa Terlibat : Hijrah Saputro, S.Ag. Magister Ilmu Adm. FISIP-UJ
Tuti Januar Amaliah, Ilmu Adm. Negara, FISIP-UJ

Sumber Dana : DIPA Universtas Jember Tahun Anggran 2013

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menginterpretasikan aksesibilitas petani singkong terhadap kebijakan pertanian untuk mengentaskan kemiskinan. Perkembangan globalisasi dan teknologi membawa perubahan bidang pertanian khususnya singkong yang mengarah pada cara bertanam menggunakan teknologi modern dan berorientasi komersialisasi. Karakteristik petani singkong subsistensi belum mendapat perhatian pemerintah dengan akses yang menguntungkan petani baik dari sisi pengelolaan tanam, modal maupun pasar. Hal tersebut menunjukkan rapuhnya komitmen etik dan moral dalam kebijakan pertanian yang selalu merugikan petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas petani singkong menghadapi kebijakan pemerintah dan kapitalis masih lemah sehingga kondisinya tetap miskin. Karakteristik petani subsistensi dengan lahan sempit dan tandus, miskin dengan pola pertaniannya yang tradisional, bersifat kegotongroyongan menyebabkan kurang rasional, sulit berubah atau bahkan menolak terhadap pola pertanian modern yang lebih menghasilkan. Pemerintah masih menganggap singkong sebagai makanan yang kurang *market oriented* yang prospeknya kurang menguntungkan sehingga tidak diprioritaskan, padahal singkong termasuk bahan makanan alternative yang menjanjikan untuk menjaga ketahanan pangan agar terhindar dari kelangkaan makanan. Kebijakan pemerintah dalam memberikan modal dan harga belum berpihak pada pemenuhan kebutuhan petani singkong sehingga petani lebih cenderung terpengaruh pedagang/kapitalis meski terkadang merugikan. Petani singkong belum mempunyai ruang gerak dalam menghadapi intervensi pemerintah dan kapitalis yang bisa memberikan informasi *button-up* kepada perumusan kebijakan secara demokratis sehingga menjamin kehidupannya. Strategi petani menghadapi pemerintah dan kapitalis dengan caranya sendiri berdasarkan pengalaman hidupnya, mereka akan menerima sepanjang sesuai nilai sosial ekonomi, budaya dan ekologisnya jika tidak maka akan menolak.

Kebijakan pemerintah melalui program sekolah lapang tanaman umbi-umbian diharapkan mampu membantu petani, namun sifatnya ternyata belum menyentuh seluruh kebutuhan petani singkong. Model aksesibilitas yang baik adalah jika dapat menyelaraskan harapan pemerintah, pengusaha dan petani singkong sehingga secara bertahap pendapatan petani singkong akan meningkat dan mampu keluar dari kemiskinan

Keyword: Aksesibilitas, Petani, Singkong, Kebijakan dan kemiskinan.

1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan teknologi membawa perubahan bidang pertanian yang mengarah pada cara bertanam menggunakan teknologi modern dan berorientasi komersialisasi. Sistem ini oleh Rachbini sudah disebut sebagai kapitalis (1996) dengan ciri kebebasan dalam berkompetisi dan efisiensi dalam usaha. Dampak yang terjadi adalah pengangguran, kerusakan lingkungan dan menghilangkan kegotongroyongan karena semua harus dibayar dengan uang dan bukan lagi karena nilai kekerabatan. Hal tersebut berarti kebijakannya salah karena mengabaikan kepentingan petani sebagai kelompok kecil dan miskin yang kurang mendapat akses dan perhatian pemerintah secara maksimal dalam pengelolaan pertaniannya. Data BPS dan DEPSOS tahun 2002 menyajikan data kemiskinan mencapai 35,7 juta jiwa dan 15,6 juta jiwa (43%) masuk kategori fakir miskin. Secara keseluruhan penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah 17,65 dan 7,7% .(Suharto, 2005). Gakin di Indonesia sebesar 37,17 juta jiwa (2007) termasuk Kabupaten Bondowoso.

Untuk mengurangi kemiskinan perlu dilakukan modernisasi bidang pertanian sebagai pusat penyerapan tenaga kerja terbesar sehingga memberi peluang aksesibilitas bagi petani dalam meningkatkan produksinya dan akses pasar agar meningkatkan pendapatannya.

Teori modernisasi menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu gerakan menuju bentuk masyarakat modern baik secara teknologi maupun institusi. Proses ini dilakukan melalui intervensi dengan melalui transfer teknologi, pengetahuan dan bentuk-bentuk organisasional dari yang tidak berkembang sampai yang maju sehingga mendorong masyarakat tradisional menjadi lebih maju. Muncul kritik terhadap modernisasi yaitu bahwa bukan karena tradisional yang menyebabkan dunia ketiga miskin, tetapi karena adanya hubungan dengan negara maju dalam sistem perdagangan internasional yang menyebabkan negara berkembang selalu kalah bersaing sehingga berada dalam posisi yang tidak beruntung. Pandangan ini bertentangan dengan pendapat Marxis dan Neo-Marxis yang menilai keterbelakangan berangkat dari imperialisme. Kemiskinan berawal dari pelibatan wilayah dalam ekonomi dunia dan keterbelakangan menekankan pada kebutuhan yang bertentangan dari negara-negara pusat kekuasaan yang imperialis dengan negara pinggiran yang dijajah. Teori ini menekankan sifat eksploitatif, ekspansionis kapitalis dan kebutuhan pasar baru, meningkatkan surplus dan mengumpulkan modal untuk kepentingan kapitalis baik asing atau nasional. Dalam hal ini pembangunan dilihat sebagai proses ketidakseimbangan yang melibatkan eksploitasi masyarakat secara berkelanjutan.

Tahun 1994 produksi pangan mulai menurun akibat pengaruh alam dan sempitnya lahan pertaniandan cuaca yang tidak menentu sehingga diberlakukan kebijakan import bahan makanan. Meskipun singkong merupakan makanan cadangan yang penting untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan bahan makanan lainnya seperti beras, jagung, sagu, namun produksi singkong tetap tidak diperhitungkan sebagai penyangga stabilitas ekonomi dan pangan karena singkong dapat tumbuh dilahan kering maupun tandus dan tidak sulit perawatannya dan keberadaan petani dibiarkan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Singkong banyak menghasikan produk-produk makanan alternatif yang memberikan prospek menjanjikan maka perlu dijaga ketersediaannya dan harganya dari jaminan pasar (*capital market*) dengan memberi dana berupa subsidi pangan dan kredit liquidasi BI. Namun singkong masih dianggap makanan tidak *market oriented* dan petani singkong belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang yang berpihak pada peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produksi singkong dengan penerapan teknologi pertanian modern, tenaga

kerja yang terampil serta modal sebagai biaya pengolahan lahan untuk mencapai produksi singkong yang lebih tinggi dan perlindungan harga dari ulah kapitalis.

Petani singkong/ubi kayu sering kesulitan mendapatkan akses modal maupun pasar dalam melakukan usaha pertaniannya, karena pinjaman diberikan dengan anggungan dan harga lebih ditentukan oleh kapitalis. Dengan keterbatasan, modal dan pengetahuan sehingga sulit mengejar permintaan/keuntungan. Petani singkong/ubi kayu masih memiliki karakteristik tradisional, namun disisi lain mempunyai pemikiran pada peningkatan ekonomi, hal tersebut akibat berkembangnya manfaat singkong/ubi kayu dalam penggunaan berbagai bahan makanan. Proses kebijakan ditentukan oleh aktor yang dapat dipandang sebagai proses transaksional yang melibatkan negosiasi dalam hal tujuan dan cara antara pihak-pihak yang berkonflik atau pihak-pihak yang berbeda kepentingan. sehingga pola pertanian membentuk cara tersendiri yang mungkin sama atau berbeda dengan kemauan pemerintah atau swasta. Bentuk intervensi pemerintah ini dalam pola pertanian singkong dapat menimbulkan respon diterima jika sesuai dan ditolak petani jika bertentangan.

Petani sebagai kekuatan *civil society* paling lemah dalam menghadapi tekanan pemerintah dan pengaruh kapitalisme, maka untuk bangkit dari keterpurukan dan menjadi penyeimbang *state* dan *market*. Perlu akses bagi petani untuk berperan sebagai bagian dari kebijakan atau program pembangunan. Aksesibilitas terletak pada kembalinya petani memegang tampuk pembangunan yang berbasis kebutuhan pokok yaitu pangan. Kolaborasi pemerintah dan swasta dibangun tanpa mengeksploitasi atau mengabaikan keterikatan antara berbagai komponenn untuk menjaga keseimbangan interaksi, saling terkait dan sinergi dari berbagai elemen menjadi kunci keberdayaan petani dalam membangun aksesibilitas menuju kesesjahteraan masyarakat.

Petani dalam menjalankan pertaniannya dihadapkan oleh hegemoni negara atau orang kaya yang menguasai faktor produksi atau pasar, yang sering bertindak bagaikan arogansi, pengrusakan, sabutase, atau masa bodoh. Mereka bagaikan raksasa yang mau menggulingkan atau merubah sistem dominan meski mereka ingin tetap berada dalam sebuah sistem tersebut. (Scoott, 1995).

Gambaran tersebut dapat menunjukkan rapuhnya komitmen etik dan moral dalam sistem perekonomian Indonesia yang sarat dengan praktek-praktek pemburuan rente ekonomi (*rent seeking*) dan inefisiensi birokrasi. Hal tersebut nampak bahwa praktek monopoli, oligopoli dan kartel memperoleh "restu" pemerintah ini sehingga menyebabkan terjadinya distorsi ekonomi dan ketergantungan petani kecil terhadap kebijakan pemerintah, petani hanya dijadikan alat produksi pangan yang hasilnya lebih banyak dinikmati oleh pemerintah dan para pemilik modal. Pergeseran peranan ekonomi antara pemerintah dan swasta akibat terjadinya perubahan struktur sumber-sumber penerimaan negara dari hasil bumi ke sumber olahan dan kegiatan jasa, maka untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerintah memerlukan keterlibatan swasta dan masyarakat. Dalam perspektif ketergantungan, corak ekonomi kapitalis yang mengukuhkan sistem monopoli dan oligopoli pada akhirnya justru mempertajam kesenjangan sosial-ekonomi. Masyarakat-masyarakat, secara ekonomi tertentang antara yang kuat akses dan asetnya dalam proses produksi, dan mereka yang lemah yang lebih banyak tereksplorasi oleh kelompok ekonomi kuat yang justru memperoleh perlindungan politik birokrasi.

Dengan segala kemampuan petani harus dapat mengatasi persoalan hidupnya termasuk berhadapan dengan pemerintah atau swasta sebagai kapitalisme. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah membangun aksesibilitas yang bisa dijadikan alat pelindung bagi petani singkong atas praktek monopoli, oligopoli dan ketergantungan. Petani singkong aktor aktif yang

membentuk strategi dalam menghadapi aktor, Institusi atau personil luar, yang sering berbenturan dengan kepentingan otoritas sentral dan agen-agen kapitalis. Pemerintah sedapat mungkin memfasilitasi berbagai kebutuhan petani singkong/ubi kayu dengan menjalin kerjasama dengan swasta agar petani singkong mampu mengembangkan usaha taninya dalam meningkatkan kesejahteraan.

Implementasi kebijakan pertanian perlu memperhatikan inisiatif petani. Akses petani akan menghasilkan produk pertanian yang tinggi. *Target group* tidak mengandalkan model *top down* atau *blue print* yang sifatnya teknokratis. Disinilah perlunya dialog yang oleh Bebbington (1995) digambarkan sbb.:

1. Tahap kontraktual (*contractual*) dimana peran petani kecil tetapi lebih menekankan pada eksperimen.
2. Tahap konsultatif (*consultative*) yaitu peneliti menampung masalah petani kemudian mengembangkan solusi.
3. Tahap kolaborasi (*collaborative*) dimana petani terlibat dan berpartisipasi dalam penelitian dan melakukan eksperimen.

Pemerintah tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap perlindungan petani singkong dan jika dibiarkan maka akan memperburuk masyarakat miskin. *Bergainng position* petani tidak mampu menggoyahkan kepentingan politik pemerintah untuk berpihak pada petani miskin khususnya singkong. Mestinya pemerintah melindungi petani agar tercipta struktur pasar yang distorsif

Aksesibilitas merupakan jalan masuk yang dapat dicapai oleh petani untuk menembus kekuatan besar dalam bentuk kebijakan pemerintah dan kapitalis agar dapat eksis sebagai petani dalam pengelolaan pertaniannya. Keterlibatan petani sebagai aktor pembangunan pertanian perlu diperhitungkan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang dipetakan pada *state*, *market* dan *civil society* yang memiliki domain, peran dan fungsi berbeda dalam membangun kelembagaan bidang pertanian.

Pertama *State* mempunyai tugas menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Kewenangannya: 1) Menciptakan kondisi politik, sosial dan ekonomi yang stabil. 2) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan social. 3) Menyediakan *public-service* yang efektif dan *accountable*. 4) Menegakkan HAM . 5) Melindungi lingkungan hidup. 6) Mengurus stndart kesehatan dan standar keselamatan publik. Kedua *Market/swasta* mempunyai tugas menyediakan lapangan kerja dan penghasilan. Kewenangannya adalah: 1) Menjalankan industri. 2) Mencipatakan lapangan kerja. 3) Menyediakan iinsentif bagi karyawan. 4) Meningkatkan standart hidup bagi masyarakat. 5) Memelihara lingkungan hidup. 6) Mentaati peraturan. 7) Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat. 8) Menyediakan kredit bagi pengembangan usaha masyarakat/UKM. Ketiga *Civil Society* mempunyai tugas memfasilitasi interkasi sosial, politik dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik dan ekonomi,. Kewenangannya adalah: menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. 2) mempengaruhi kebijakan publik sebagai sarana *check and balances* pemerintah. 3) mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah. 4) mengembangkan SDM dan saran komunikasi antar anggota masyarakat.

Petani sebagai kekuatan *civil society* paling lemah dalam menghadapi tekanan pemerintah dan pengaruh kapitalisme, maka harus diberdayakan untuk bangkit dari keterpurukan dan menjadi penyeimbang *state* dan *market*. Perlu akses bagi petani untuk berperan sebagai bagian dari kebijakan atau program pembangunan. Aksesibilitas terletak pada kembalinya petani memegang tampuk pembangunan yang berbasis kebutuhan pokok yaitu pangan. Meski

kolaborasi pemerintah dan swasta selama ini demi keuntungannya sendiri hingga mengeksploitasi masyarakatnya hingga sengsara. Hal tersebut terjadi karena mengabaikan keterikatan antara berbagai komponenn tersebut dan oleh karena itu keseimbangan interkasi, saling terkait dan sinergi dari berbagai elemen menjadi kunci keberdayaan petani dalam membangun aksesibilitas menuju kesesjahteraan masyarakat.

Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya apabila petani memiliki kekuatan pasar dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Disisi lain perlu diperhatikan bahwa kemiskinan bukan persoalan individu melainkan struktural, karena alasan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan, sehingga strategi kemiskinan harus bersifat institusional atau melembaga, namun jika petani mempunyai akses yang memadai maka bisa memperoleh pilihan yang lebih banyak atas berbagai alternative yang ada, serta aktif dalam mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya karena kondisi petani bukan karena tidak punya ketrampilan atau pengetahuan melainkan akibat dari kondisi modernisasi yang memaksa petani menerima dampak tekanan-tekanan kebijakan pemerintah atau kapitalis. Maka dengan perkembangan kemampuan dan perubahan manusia akan dapat menentukan inisiatifnya dalam mencapai kesesjahteraan, berubah rasio, dan ada pertimbangan efisiensi.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada karakteristik dan profil petani singkong, makna bentuk intervensi pemerintah terhadap pola pertanian singkong di Kabupaten Bondowoso yang mengintrodusir kehidupan petani, respon petani dalam menyiasati kebijakan pemerintah dan kapitalis sehingga dapat membangun akses petani pada pasar dan pemerintah terutama pola kemitraan untuk mendapatkan fasilitas pengelolaan pertanian dan posisi tawar yang tinggi untuk hasil pertanian singkong/ubi kayu. Penentuan informan menggunakan *snowball sampling*. Sebagai informan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Kepala Bidang Tanaman Hortikultura, Kabi Tanaman Pangan, Kasi Tanaman Umbi, PPL, Mantan, pengepul/pedagang dan petani singkong. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan teori Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas petani singkong menghadapi kebijakan pemerintah dan kapitalis masih lemah sehingga kondisinya tetap miskin. Karakteristik petani subsistensi dengan lahan sempit dan tandus, miskin dengan pola pertaniannya yang tradisional, bersifat kegotongroyongan menyebabkan kurang rasional, sulit berubah atau bahkan menolak terhadap pola pertanian modern yang lebih menghasilkan. Pemerintah masih menganggap singkong sebagai makanan yang kurang *market oriented* yang prospeknya kurang menguntungkan sehingga tidak diprioritaskan, padahal singkong termasuk bahan makanan alternative yang menjanjikan untuk menjaga ketahanan pangan agar terhindar dari kelangkaan makanan. Kebijakan pemerintah dalam hal modal dan harga belum berpihak pada pemenuhan kebutuhan petani singkong sehingga petani lebih cenderung terpengaruh pedagang/kapitalis yang terkadang merugikan petani. Petani singkong belum mempunyai ruang gerak dalam menghadapi intervensi pemerintah dan kapitalis yang bisa memberikan informasi *button-up* kepada perumusan kebijakan secara demokratis

sehingga menjamin kehidupannya. Kebijakan yang sesuai akan diterima sebaliknya jika bertentangan maka akan ditolak.

Karakteristik petani singkong dalam pengerjaan pertaniannya bersifat tradisional namun sudah rasional dan berorientasi pasar dimana pertimbangan keputusan dalam bertani didasarkan keputusan untuk dirinya dan problem solver sehingga memungkinkan mudah untuk menerima ide-ide baru dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Meskipun singkong/ubi kayu dianggap makanan murahan dan kurang komersial, namun dengan potensi yang ada yaitu lahan yang tersedia, kemauan petani berinovasi sangat tinggi serta usaha mempertahankan kota tape sebagai ciri khas kota Bondowoso sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan singkong sangat besar. Selain itu besarnya permintaan singkong/ubi kayu sebagai bahan dasar tepung tapioka bagi perusahaan khususnya kota Lumajang dan kebutuhan bahan makanan ringan juga sangat tinggi sehingga menjadi motivasi petani singkong untuk tetap menanam singkong sebagai andalannya untuk dijual dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun diakui masih terdapat petani subsistensi dengan lahan sempit, orientasi ekonomi keluarga dan bersandar pada kelompok dengan kebiasaan yang telah lama dilakukan karena keterbatasan pengetahuan dan kemauan serta modal sehingga mereka sulit berubah.

Kelompok petani singkong sudah bertani secara modern berdasarkan kebijakan pemerintah melalui kegiatan Sekolah Lapang Ubi Kayu yang menganjurkan menerapkan pola tanam secara modern dengan bibit pilihan, pemupukan, pengobatan serta cara bercocok tanam sesuai pola tanam sebagai ketentuan dari penyuluh lapangan. Namun dalam pelaksanaan masih sering mengalami permasalahan karena nilai-nilai baru tersebut tidak selalu sesuai tuntutan pasar seperti PPL menganjurkan bibit Kaspro yang mampu menghasilkan singkong lebih besar dan banyak, namun petani enggan menanam bibit tersebut karena tidak diminati perusahaan tape atau pasar yang lebih menghendaki singkong jenis mentega (kuning) yang ditanam di tanah kering/tandus sehingga ubinya tidak besar dan itu justru akan menghasilkan tape yang kenyal dan enak. Petani akan lebih berorientasi pada permintaan pedagang tape setempat/pegepul meski hasilnya kecil sehingga juga pendapatannya kecil. Petugas lapangan sering mengalami penolakan, hal tersebut karena pihak pemerintah sendiri belum mampu menjamin harga singkong di pasaran, dan petani berjuang sendiri mencari pasar untuk menjual singkongnya serta dalam penetapan standart harganya yang terkadang sangat merugikan petani singkong, mengingat singkong termasuk bahan makanan yang tidak tahan lama sehingga jika terlambat menjualnya akan mengalami busuk, maka keputusan untuk menjual secara cepat hasil pertaniannya menjadi pertimbangan keputusan cepat yang harus segera diambil petani. Pemerintah seharusnya bisa membantu petani mengambil keputusan terbaik dengan memberi bantuan teknologi yang tepat cara memproduksi jenis singkong sesuai keinginan pedagang dengan hasil banyak dan harga yang kompetitif sehingga petani tidak merugi.

Permasalahan lain yaitu modal dan pengetahuan yang sangat terbatas mengakibatkan petani menanam singkong dengan modal seadanya sesuai pengalamannya bertahun-tahun yang tradisional. Bantuan pemerintah masih minim serta tidak difasilitasi akses modal, pengetahuan dan keahlian bagi petani untuk mendapatkan kredit dari lembaga perbankan dan pendidikan atau pelatihan yang memadai. Hal tersebut sering dimanfaatkan bagi pihak lain untuk meminjamkan modal dengan bunga tinggi sehingga mencekik petani. Seharusnya pemerintah memfasilitasi kebutuhan modal melalui kebijakan kredit bagi petani singkong agar tidak tertindas dari tengkulak atau lintah darat. Pemerintah sudah seharusnya tidak menganak-tirikan petani singkong dan memberikan akses modal dan pasar secara pasti sehingga memberikan pengamanan bagi petani singkong untuk menjadi alat efektif dalam menciptakan posisi tawar dalam menentukan harga yang dapat meningkatkan pendapatannya. Kebijakan pemerintah dalam bentuk pengembangan usaha singkong sudah dilakukan yaitu membentuk sekolah lapang tanaman umbi-umbian dengan memberikan bantuan pupuk, bibit dan pendampingan dalam pola tanam yang lebih modern oleh PPL dan Mantri Tani dengan membentuk kelompok-kelompok tani singkong. Namun hal tersebut sifatnya belum merata dirasakan oleh petani singkong karena bantuan hanya terfokus pada seorang yang justru mempunyai lahan yang luas, sementara petani lain hanya diberi pendampingan sehingga dengan keterbatasan yang ada mengakibatkan pengelolaan usaha pertanian singkong tidak mencapai hasil maksimal. Petani masih tetap bergelut dengan kemampuan sendiri menghadapi kebijakan

pemerintah dan kapitalis/swasta yang terkadang membuat tidak berdaya dan tertekan sehingga tetap miskin dengan jumlah keseluruhan sebesar **165.163 jiwa dengan kriteria** hampir miskin **91.831 jiwa**, miskin **46.409 jiwa** dan sangat miskin **26.923 jiwa**. Berbagai upaya perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah kemiskinan khususnya mereka yang berkecimpung di bidang pertanian

Dalam menghadapi kebijakan pemerintah dan kapitalis yang memaksa petani singkong terlibat dalam aktivitasnya, petani singkong perlu cerdas memanfaatkan peluang atau celah untuk tetap mempertahankan subsistensinya. Respon petani singkong dalam menyiasati kebijakan adalah dengan menciptakan sistem sendiri yang dianggap sederhana, menguntungkan dan tetap memegang prinsip gotong royong sebagai ciri kehidupan masyarakat desa. Kebijakan pemerintah melalui teknik bertanam singkong dimanfaatkan dengan baik sepanjang itu menguntungkan petani, disisi lain keberadaan kapitalis jangan menciptakan ketergantungan, namun sedapat mungkin dimanfaatkan untuk memotivasi dan berinovasi dalam meningkatkan hasil pertaniannya sehingga mampu menghadapi kekuatan pasar dan ikut mempengaruhi harga pasar untuk meningkatkan pendapatannya.

Petani singkong memang berada pada posisi lemah, namun dengan strategi dan segala kemampuannya dengan tingkat selektif yang tinggi berusaha untuk menghadapi kekuatan eksternal dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatannya. Petani mau tidak mau harus berkecimpung dengan perekonomian global yang bebas yang mengarah pada ekonomi uang sehingga tidak jarang petani terikat dengan kontrak untuk mendapatkan upah atau imbalan uang kontan.

Respon petani singkong dalam memanfaatkan teknologi modern sepanjang itu menguntungkan bagi petani maka mereka akan mengadopsinya. Sebenarnya mereka telah memahami akan manfaatnya namun terkadang terjadi ketidak tepatan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat petani singkong sendiri mengakibatkan terjadi penolakan. Masuknya kaum pedagang/kapitalis juga membawa pengaruh besar pada komersialis yang selalu berdasarkan pertimbangan ekonomi. Namun petani bukanlah pihak yang mudah dibodohi dan selalu menurut kemauan kapitalis, karena petani singkong telah mempunyai pendirian dan bertindak atas dasar pertimbangannya sehingga membentuk potensi dalam menghadapi kapitalis. Meski dengan keterbatasan yang bisa terkalahkan akibat kekuatan modal dan fasilitas yang dimiliki kapitalis, namun petani mampu menciptakan kesempatan untuk bergerak menghadapi kapitalis sehingga sedikit banyak ikut menentukan pola pertaniannya, produksinya, harganya maupun pasarnya meski hanya kecil perannya.

Kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan tambahan dari singkong belum mampu sepenuhnya menjadi harapan petani dalam memenuhi kebutuhan singkong agar tidak terjadi kelangkaan pangan. Banyak keterbatasan kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan modal, pupuk, obat, bibit dan lainnya bagi petani singkong. Petani masih kesulitan mengikuti anjuran pola tanam secara modern karena keterbatasan kemampuan utamanya bagi petani miskin, namun dengan sistem kegotongroyongan yang telah tertanam di masyarakat mereka bisa saling membantu. Jika tidak baik bagi petani maka akan ditolak sebaliknya jika baik akan diterima sehingga menjadi sinyal bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan. Hasil usaha singkong dapat dilihat tabel berikut:

Hasil tahun 2011 luas lahan 7.418 ha dengan hasil rata-rata 209,43 ton dan total produksi sebanyak 155.354 ton menurun pada tahun 2012 menjadi 6.142 ha dengan hasil rata-rata 140,7 ton dan total 86.277 ton. Hal tersebut karena terjadi penyempitan lahan pertanian dan faktor musim kemarau yang berkepanjangan sehingga untuk produksi singkong (khususnya Jenis Kaspro) tidak bisa besar namun jika hujan sekali saja maka akan membesar bahkan bisa mencapai 5-8 kg per biji). Pada saat kemarau terjadi kekurangan bahan singkong dan harganya bisa mencapai Rp 900,- sampai Rp 1.000,-/kg , untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar singkong hingga didatangkan dari Lumajang dan Jember atau daerah sekitar. Naiknya harga singkong belum mampu meningkatkan pendapatan petani karena sebagian besar petani masih terjerat hutang sebagai biaya pengelolaan pertanian, sementara subsidi pemerintah masih sangat terbatas karena tanaman singkong belum menjadi prioritas bagi pemerintah, padahal singkong sudah mampu mengurangi import bahan makanan sebesar 7 % dari seluruh kebutuhan bahan makanan. Hasil singkong di Kabupaten Bondowoso dan pemanfaatannya sebagai bahan dasar tape dapat dilihat pada gambar berikut;



Petani adalah aktor penting dalam pembangunan pertanian khususnya singkong/ubi kayu, maka untuk itu pemerintah harus tetap menyediakan kebutuhan bagi petani singkong yaitu membangun aksesibilitas bagi petani singkong agar dapat mengelola pertaniannya secara modern, terpenuhi kebutuhan modal, memberi peluang bagi petani untuk menentukan harga sehingga mampu bersaing di pasar dengan daya tawar yang tinggi dan tetap menjaga nilai-nilai kebesamaan. Model kebijakan yang baik adalah jika mampu menyelaraskan apa yang diharapkan pemerintah, pengusaha dan petani singkong secara selaras Petani singkong perlu diberi ruang gerak dalam menghadapi intervensi pemerintah dan kapitalis untuk bisa memberikan informasi *button-up* kepada perumusan kebijakan yang demokratis. Kebijakan pada akhirnya dapat diintrodusir melalui pola tanam sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat petani singkong dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keluar dar kemiskinan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

1) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik petani singkong dalam usaha pertaniannya menggambarkan pada moral ekonomi yang bercirikan ekosistensi yang masih

bersifat kekeluargaan, kelompok atau tradisi kegotongroyongan dan dalam pengerjaannya belum digunakan teknologi secara maksimal karena keterbatasan modal. Masih ada anggapan bahwa singkong dianggap makanan murah dan mudah hidup sehingga pola pengerjaannya tidak perlu terlalu direpotkan dengan berbagai aturan. Petani dengan kebiasaannya dapat menjalankan pengelolaan tanaman singkong dengan potensi seadanya, pengetahuan yang terbatas dan modal yang kecil. Namun dengan perkembangan yang ada petani singkong sudah mulai berubah karakteristiknya menuju rasional dimana dengan tuntutan pasar dan kebijakan teknologi baru merubah ide-ide dan perilakunya untuk menerapkan teknologi baru yaitu dengan menerapkan pola pertaniannya dengan bibit unggul, pola tanam yang benar, pupuk, obat-obatan dan pemasaran yang berdaya tawar tinggi. Petani yang dulu bertanam seadanya dan sembarangan mulai menerapkan pengetahuan dan pengalaman dari sekolah lapang dengan harapan menghasilkan produk yang lebih banyak. Namun kendala yang terjadi adalah kecilnya akses modal dan pasar bagi petani. Petani belum bisa banyak menentukan kebijakan dan daya tawar atas harga singkong atau melakukan sistem kontrak, namun kesepakatan jual ke tengkulak atau pengepul sudah dilakukan namun dengan harga dominan ditentukan pengepul atau pedagang. Sedangkan perhitungan ekonomi sudah berjalan artinya pekerja sudah mengharapkan upah dan tidak lagi karena nilai kekeluargaan atau kegotongroyongan. 2) Kebijakan penggunaan teknologi baru bagi petani singkong sepanjang itu menguntungkan petani yaitu akan menerima program-programnya, dan jika merugikan maka akan ditolak, sedangkan keberadaan kapitalis akan dimanfaatkan petani dengan bernegosiasi dalam akses penjualan produksinya. Dalam situasi yang demikian agar petani tidak dimanfaatkan kapitalis maka membentuk jaring pengaman dengan cara membuat kelompok tani sehingga komunikasi tentang berbagai hal berjalan lancar, misalkan penentuan harga maka tidak akan terjadi ketimpangan yang besar. Sebenarnya kekuatan kelompok belum maksimal karena petani masih sering terjerat utang yang bisa mencekik dirinya, sementara pemerintah tidak bisa berbuat banyak. 3) Aksesibilitas petani atas kebijakan pemerintah sedikit banyak membantu memberikan wacana menuju perubahan karena petani mendapatkan pengetahuan, pendampingan dan bantuan modal (bibit, pupuk, obat) hanya saja belum merata pada seluruh petani singkong. Khususnya petani miskin karena mereka terbatas dana dan pengetahuan. Sedangkan akses pasar secara penjualan petani membangun sendiri jaringannya karena sudah mempunyai pelanggan kepada siapa singkong akan dijual namun tentang jenis produk dan harganya lebih banyak ditentukan oleh pedagang. Bahkan sampai masa panen ditentukan pedagang sehingga sering merugikan petani. Apalagi singkong merupakan bahan makanan yang tidak tahan lama sehingga diperlukan keputusan secara cepat agar tidak rugi. Kebijakan pemerintah lebih cenderung bersifat teknis sementara yang menyangkut aspek harga, kualitas dan akses pasar tidak banyak terlibat dan masyarakat dibiarkan mencari jaringan sendiri.

Saran

- 1) Kebijakan perlu dirumuskan dengan memberikan akses terkait dengan perlindungan petani singkong agar berkelanjutan dengan memahami berbagai aspek kemasyarakatan (sosial ekonomi) sebagai permasalahan mendasar untuk membawa petani keluar dari kemiskinan dan ketergantungan. 2) Kebijakan harus berpihak pada petani dimana petani diberi akses ruang gerak dalam ikut menentukan kebijakan dan pasar sehingga tidak diombang-ambingkan oleh kebijakan pemerintah dan kapitalis. 3) Teknologi yang dikenalkan oleh PPL dan Mantri Tani hendaknya terjangkau oleh petani singkong dan perlunya penambahan bantuan kepada petani singkong secara lebih merata sehingga tidak

menimbulkan kecemburuan sosial. 4) Pemerintah dan swasta perlu berkomitment untuk menjaga dan membantu perkembangan petani singkong agar konsisten dalam menjaga ketahanan pangan agar tidak terjadi kalaparan dan sekaligus meningkatkan kesesjahteraan petani untuk keluar dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, 1999, *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan Di Tengah Krisis moneter*. Dinar Wijaya, Brawijaya University Press, Malang.
- Amang B, 1996, *Perspektif Persoalan Pangan Dunia Memasuki Abad ke 21 dan Kesiapan Indonesia untuk kemandirian Pangan*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Musyawarah Keluarga KAHMI, Bogor.
- Corten, David, 2000, *Menuju Abad 200: Tindakan Sukrela dan Agenda Global*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Edi, Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Rafika Aditama Bandung.
- FAO, 2002, *Cereal Policies Review*, Rome.
- Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Press Malang.
- Huberman, A. Michael dan H.B. Miles, 1992, *Analisis data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode- etode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*. FIA. UNniversitas Brawijaya, Malang.
-, 1999, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jinghan ML., 1999, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2006, *Penelitian Metode kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Norman and Jan Douwe Van Der Ploeg, 1999, *Demythologizing planed Intervension: An Actor Perspective*, *Sciologia*. Vol. XXIX-3/4.
- Saputro, Soedarsonom Hadi, 1998, *Pembangunan Pertanian, Seksi Ekonomi Pertanian*, Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta.
- Soemintoro, Remi Sutastie dan Prijono Tjiptorijanto, 2002, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Scoots, James C, 1995, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistem di Asia Tenggara*.
- Sumardi, Mulyanto & Hans-Dieter Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, CV Rajawali, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta